PEMBANGUNAN DAERAH TERSENDAT, OMBUSDMAN BANTEN MINTA WH SEGERA SALURKAN DBHP TEPAT WAKTU

Rabu, 24 Maret 2021 - Rizal Nurjaman

RMOLBANTEN, SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) harus konsisten sesuai komitmen menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) 2020 ke delapan Kabupaten/Kota tepat waktu dan tepat sasaran.

Permintaan itu disampaikan Kepala Ombudsman Banten, Dedy Irsan dalam merespon keterlamabatan penyaluran DBHP 2020 oleh Pemprov Banten, Selasa (23/3).

"Kami minta penylauran DBHP dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, kalau udah waktunya segera di kasih ke Kabupaten/Kota karena DBHP haknya mereka," ujar Dedy.

Dikatakan Dedy, Berdasarkan informasi dari Kabupaten/Kota keterlambatan DBHP 2020 ini berpengaruh terhadap berbagai sektor terutama sektor pembangunan di masing-masing daerah.

Mengingat, Jelas dia, DBHP yang tertuang di dari bulan Juli hingga November 2020 merupakan dana tunai yang masuk ke RKUD Pemprov Banten di Bank BJB, secara langsung bentuk fisik uangnya dipastikan ada, apalagi di perkuat dengan SK Gubernur maka DBHP atas BHPP bulan Juli sampai November sudah bisa dicairkan.

"Kita berharap cepat disalurkan, kita nggak ingin mereka terhambat, kalau ada proses menggantung dimana harus diselesaikan. Macetnya dimana, karena udah menjadi hak Kabupaten/Kota," katanya.

Dedy memandang, statemen Gubernur yang terus berulang akan membayarkan DBHP 2020 dengan menggunakan APBD 2021 secara bertahap belum ada kepastian tenggat waktu.

"Kita belum dapat keterangan resmi dari Pemprov Banten, tapi yang dari 2020 belum (dibayarkan), rencanaya pakai APBD 2021 pembayarannya bertahap," terang Dedy.

Sebab itu, Dedy mengingatkan Pemprov Banten harus menaati serta menjalankan aturan prihal pembagian DBHP, jangan sampai nantibterindikasi penyalahgunaan wewenang.

"Aturan itu mereka yang buat, kita lihat apakah ada pelanggaran ketika aturanya harus disalurkan berarti ada masalah," tandasnya. [ars]